



MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN
 DPRD KOTA YOGYAKARTA

AKTIVITAS EKONOMI KEMBALI PULIH

Kawal Industri Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah

YOGYA (KR) - Pandemi Covid-19 yang dirasakan Kota Yogyakarta sepanjang tahun 2020 hingga 2021 berdampak signifikan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat maupun pemerintah. Tahun ini seiring upaya pemulihan dan momentum kebangkitan, Komisi B DPRD Kota Yogyakarta tidak pernah lepas melakukan pengawasan. Terutama dalam mengawal industri pariwisata dan pendapatan asli daerah melebihi proyeksi.

Sebagai salah satu alat kelengkapan di lembaga dewan, Komisi B memiliki peran strategis. Hal ini karena ketugasannya di bidang perekonomian dan keuangan. Tanpa mengesampingkan aspek lainnya, aktivitas perekonomian cukup berpengaruh terhadap keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, mitra kerja Komisi B hampir menyentuh semua dinas

yang berkaitan dengan pendapatan. Komisi B DPRD Kota Yogyakarta digawangi tiga orang pimpinan yakni Ketua Susanto Dwi Antoro SE, Wakil Ketua Rifki Listianto SSi MSc, dan Sekretaris R Krisma Eka Putra SE.

Dalam menjalankan fungsinya, Komisi B lebih banyak melakukan koordinasi dengan mitra kerja. Tirajuan ke wilayah juga kerap dilakukan guna memastikan program pemerintah di bidang ekonomi berjalan dengan baik. "Kita semua bisa merasakan bagaimana selama dua tahun lalu ekonomi benar-benar terpuruk akibat pandemi Covid-19. Tahun ini pun bukan lagi refocusing maupun rekonstruksi tetapi sudah pemulihan bahkan sudah kembali pulih," tandas Susanto Dwi Antoro.

Oleh karena itu, dalam proses pembahasan rencana kegiatan anggaran tahun 2023 bersama mitra kerja di jajaran eksekutif,



KR-istimewa
Susanto Dwi Antoro SE



KR-istimewa
Rifki Listianto SSi MSc



KR-istimewa
R Krisma Eka Putra SE

Komisi B fokus mencermati industri pariwisata dan berbagai turunannya serta pendapatan asli daerah. Apalagi sektor ekonomi di Kota Yogyakarta banyak ditopang oleh industri pariwisata mulai dari akomodasi, transportasi hingga pelaku UMKM. Menggeliatnya tingkat kunjungan wisatawan di Kota Yogyakarta harapannya mampu meningkatkan perputaran uang yang dirasakan hingga lapisan masyarakat paling bawah. Kondisi tersebut pun idealnya turut mendorong pendapatan asli daerah.

Dicontohkannya meningkatnya kunjungan wisatawan selama ini banyak dirasakan manfaatnya oleh kalangan perhotelan, restoran, toko oleh-oleh, jasa parkir, dan lainnya. Akan tetapi pasar tradisional juga memiliki potensi yang tidak kalah menarik untuk menjadi jujukan wisatawan. Terutama pasar yang terletak di kawasan premium atau pusat kota dan berdekatan dengan des-

tinasi wisata. Komisi B akan mengusulkan ada standarisasi pasar tradisional dengan mengedepankan kearifan lokal. Sehingga dalam melakukan penataan ada pedoman dari sisi display dagangan, jenis dagangan hingga konsep bangunan fisik.

Secara bertahap, seluruh pasar di Kota Yogyakarta yang kini berjumlah 29 pasar perlu upaya penataan yang berkesinambungan. Penataan itu tidak harus dengan merogoh kocek APBD melainkan mengak-

perkuat kampung wisata. Sedangkan terkait pendapatan asli daerah, menurut pandangan Komisi B saat ini kondisinya sudah berangsur pulih. Pajak hotel dan restoran setidaknya telah kembali seperti sebelum pandemi, bahkan tidak menutup kemungkinan akan melebihi. Begitu pula pajak daerah dari sektor lain karena aktivitas masyarakat sudah tidak ada pembatasan. Sehingga Komisi B akan terus mengawal penentuan target pendapatan asli daerah yang ditetapkan oleh pemerintah hingga realisasinya.

Tidak ketinggalan keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satu yang perlu didorong ialah PD Jogitama Vishesha atau XT Square. "Selama pandemi badan usaha tersebut sempat terpuruk. Namun kini seharusnya mampu segera bangkit agar bisa memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah," (Dhi-f



Rapat kerja Komisi B bersama eksekutif.



Rapat kerja Komisi B bersama eksekutif.



Kunjungan Komisi B ke wilayah bersama mitra kerja.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005